



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUKHLIS
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 92807

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.511.000.000

1. Tanah Seluas 156 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 802.000.000
2. Tanah Seluas 1100 m2 di KAB / KOTA SIDENRENG RAPPANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. Tanah Seluas 297 m2 di KAB / KOTA SIDENRENG RAPPANG, HASIL SENDIRI Rp. 46.000.000
4. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 41.000.000
5. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 41.000.000
6. Tanah Seluas 8 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 462 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA ---, HASIL SENDIRI Rp. 371.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 212.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 30.000.000



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp.

Rp.

1.753.000.000

III. HUTANG

Rp.

87.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.666.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.